

PEMBIYAAAN PENDIDIKAN TINGGI

Busthomi Ibrohim

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: busthomi.ibrohim@uinbanten.ac.id

Abstract. *The BHMN implementation policy for a number of State Universities (PTN) may continue. This policy resulted in the consequences of tuition fees becoming more expensive, because the university sought shortcuts to address the shortage of funds by way of SPP. Understandable if this step invites protests from students, parents and the community, because they have to spend up to tens of millions of dollars to be able to study at these respected universities. The concept of higher education by the government that is considered too burdensome state budget is observed with the emergence of the concept of educational education through corporations called corporat corporacy. The benefits of higher education for individuals are increased salaries and income, wider employment options, greater savings, and the kind of work and workplace. The economic benefits of higher education are increased tax revenues, increased productivity, increased consumption, increased labor adaptability and reduced dependence on government financial aid. The benefit for the community is the improvement of welfare. And the benefit for college itself is the improvement of college quality.*

Keywords. *BHMN, Education Policy, PTN, SPP, Corporate Corporate.*

Abstrak. Kebijakan penerapan BHMN bagi sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mungkin akan terus berlanjut. Kebijakan ini melahirkan konsekuensi biaya pendidikan menjadi kian mahal, sebab universitas mencari jalan pintas guna mengatasi kekurangan dana dengan cara SPP. Dapat dimaklumi bila langkah ini mengundang protes keras dari mahasiswa, orangtua dan masyarakat, karena mereka harus mengeluarkan uang sampai puluhan juta rupiah untuk bisa kuliah di perguruan tinggi terpadang tersebut. Konsep pembiayaan pendidikan tinggi oleh pemerintah yang dianggap terlalu memberatkan anggaran negara dicermati dengan munculnya konsep pembiayaan pendidikan melalui korporasi yang disebut dengan *corporat corporacy*. Manfaat pembiayaan pendidikan tinggi bagi individu adalah peningkatan gaji dan penghasilan, pilihan pekerjaan yang luas, tabungan (*savings*) *relative* lebih besar, dan jenis pekerjaan dan tempat bekerja yang baik. Manfaat ekonomi pembiayaan pendidikan tinggi adalah peningkatan pendapatan pajak, peningkatan produktiftas, peningkatan konsumsi, peningkatan adaptabilitas tenaga kerja dan penurunan ketergantungan pada bantuan *financial* pemerintah. Manfaat bagi masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan. Dan manfaat bagi perguruan tinggi sendiri adalah peningkatan mutu perguruan tinggi.

Kata Kunci. *BHMN, Kebijakan Pendidikan, PTN, SPP, Corporet Corporacy.*

Pendahuluan

Dewasa ini *euphoria* demokrasi sedang marak di Indonesia sehingga melahirkan berbagai jenis pendapat, pandangan dan konsep yang tidak jarang satu sama lain saling berseberangan. Salah satu hasil dari munculnya *euphoria* adalah pendapat mengenai reformasi pendidikan nasional.

Setelah terbentuknya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang rumusannya dapat kita baca pada pasal 7 ayat 1 “Kewenangan daerah mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan bidang lain”, maka proses desentralisasi pendidikan nasional lebih terbuka, karena pendidikan termasuk aspek yang disentralisasikan. Disentralisasikan pendidikan itu sering disama aritikan dengan otonomi pendidikan, yang menurut Paul L. Dressel adalah “*Self-government*” atau “*to govern it self without outside controls*” (Dress, 1980:1) Dalam artian, mampu mengatur diri sendiri dan juga mengatur keuangannya sendiri. Itulah sebabnya, dalam SISDIKNAS tahun 2003, menekankan kepada pendidikan tinggi nasional, khususnya perguruan tinggi negeri untuk mengubah statusnya menjadi perguruan tinggi BHMN (Badan Hukum Milik Negara).

Pembahasan

Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Kontroversi penerapan BHMN bagi sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) mungkin akan terus berlanjut. Kebijakan ini melahirkan konsuekensi biaya pendidikan menjadi kian mahal, sebab universitas mencari jalan pintas guna mengatasi kekurangan dana dengan cara menaikkan uang pangkal dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Dapat di maklumi bila langkah ini mengundang protes keras dari mahasiswa, orang tua dan masyarakat, karena mereka harus mengeluarkan uang sampai sepuluh juta rupiah untuk bisa kuliah di perguruan tinggi terpendang tersebut.

Menurut hemat kami permasalahan utamanya tidak semata mata terletak pada penerapan BHMN, akan tetapi kebijakan tersebut hanyalah merupakan dampak dari minimnya dana yang di miliki pemerintah dalam memajukan pendidikan tingginya, belum lagi konsentrasi pemerintah juga tidak hanya pendidikan saja, melainkan banyak permasalah yang harus di tuntaskan akibat krisis multi dimensional yang melanda indonesia selain itu, pihak perguruan tinggi sendiri terlihat sangat kurang mampu mengembangkan jiwa interprenershipnya, sehingga jalan yang di tempuh adalah menekan pihak mahasiswa dan orang tua. Kebijakan pendanaan seperti ini, pernah terjadi di united kingdom (Inggris), dimana hanya ada satu universitas di

inggris yang mampu mengembangkan pendanaan pribadi, yaitu universitas buckkingham (Johnson, *et.al.*, 1995:525).

Untuk kasus pendidikan tinggi di indonesia nampaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang terjadi di inggris. Bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, tentu mengalami kesulitan serius dengan beban biaya pendidikan yang sangat mahal itu. Ini memang dilematis, terutama dikaitkan dengan kemampuan pemerintah yang terbatas dalam menyediakan anggaran pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tinggi memang memerlukan biaya besar, yang tidak mungkin bila hanya mengandalkan sumber dana peerintahan semata (baca: dana publik). Selama ini, yang menikmati layanan pendidikan tinggi adalah kelompok masyarakat yang dalam strata social tergolong kelas menengah keatas. Ada argument reasional dan alasan logis yang mendukung langkah universitas menaikkan biaya pendidikan. Sebab, sasaran utamanya adalah meningkatkan kontribusi (dalam bentuk uang pangkal dan SPP) bagi mahasiswa yang berasal dari lapisan kelas menengah tersebut.

Menurut kami, kebijakan seperti itu jelas jelas diskriminatif, karena azas keadilan tersampaikan, belum lagi dana SPP yang di dapatkan dari mahasiswa yang mampu tersebut tidak dapat di manage secara langsung oleh pihak universitas yang bersangkutan, melainkan harus di setorkan terlebih dahulu ke kas negara, baru kemudian di ambil kembali oleh pihak universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perlu terus diperhatikan aspek pemerataan pendidikan tinggi Indonesia, karena jumlah calon mahasiswa yang mengayam pendidikan tinggi semakin tahun semakin banyak (Tilaar, 1995:221).

Jika masyarakat kelas menengah yang paling banyak mendapatkan akses pendidikan tinggi, maka penggunaan dana publik (yang bersumber dari pajak) untuk membiayai universitas justru bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan kata lain, investasi dana public untuk pengembangan perguruan tinggi harus menghitung besaran nilai ekonomi dan tingkat kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat luas. Jadi, ada rasionalitas ekonomi dibalik kenaikan biaya pendidikan itu, yang secara tehnik dilakukan dengan membuat analisis perbandingan antara *public economic benefits* dan *private economic benefits*.

Memang adanya inters yang bernuansa '*private economic benefits*' dalam dunia pendidikan sangat jelas. Karena hubungan antara pendidikan dan perkembangan ekonomi sangat erat sekali, baik itu pendidikan dasar, menengah ataupun pendidikan tinggi. Menurut Dahlin, secara umum mafaat yang ditimbulkan dapat dibagi menjadi bagian, dengan besar manfaat berjenjang sesuai dengan tingkat pendidikan yang terselenggara. Adapun keempat manfaat tersebut ialah: 1) Manfaat pengeluaran, dimana setiap lembaga pendidikan yang ada akan mendorong kenaikan permintaan.

2) Manfaat ilmu pengetahuan, dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan penelitian, diharapkan pendidikan akan mampu mendorong kemampuan inovasi industri sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 3) Manfaat tenaga kerja ; akan tercipta banyak tenaga kerja baru dengan kemampuan skill yang lebih baik, sehingga mendorong produktifitas tenaga kerja di setiap sektor produksi. 4) Manfaat kemakmuran, setiap orang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh peningkatan pengetahuan, kesempatan kerja yang lebih baik, sehingga pendapatan yang diperoleh akan meningkat, tercapai pemerataan pendapatan dan kemakmuran sosial (Brian, 2003).

Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan jika relevansi antara pendidikan dan peningkatan ekonomi yang sedemikian menjanjikan kemudian dinodai dan dibatasi oleh kebijakan segelintir manusia yang terkesan mempersulit anak-anak bangsa yang kurang mampu secara ekonomi untuk meningkatkan *economical life*-nya lewat jalur pendidikan tinggi di Indonesia.

Manfaat dan Keuntungan Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Dalam teori ekonomi, *terminology public economic benefits* diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang memberi manfaat bagi masyarakat luas setelah seseorang berhasil menamatkan jenjang perguruan tinggi. Jamel Merisotis dalam *Who Benefits from Higher Education?* (1988) membuat lima kategori public economic benefits. *Pertama*, peningkatan pendapatan pajak. *Kedua*, peningkatan produktifitas. Tesis umum berlaku adalah: semakin tinggi level pendidikan yang dicapai, kian luas pula pengetahuan dan ketrampilan tehnik yang didapat. *Ketiga*, peningkatan konsumsi. Berbagai studi menunjukkan, peningkatan konsumsi itu parallel dengan level pendidikan. *Keempat*, peningkatan adaptabilitas tenaga kerja. Persaingan ekonomi yang sangat ketat pada level global menuntut tenaga kerja bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. *Kelima*, penurunan ketergantungan pada bantuan *financial* pemerintah. Para lulusan perguruan tinggi cenderung kurang memerlukan program bantuan social yang diberikan pemerintah. Sebab, secara ekonomis mereka sudah berkecukupan dan mampu memenuhi sendiri berbagai kebutuhan dasar tersebut.

Sementara terminologi, '*private economic benefits*' diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang memberi manfaat hanya bagi individu bersangkutan setelah ia berhasil menamatkan jenjang pendidikan tinggi. Ada lima kategori *private economi benevite*. *Pertama*, peningkatan gaji dan penghasilan. Para lulusan perguruan tinggi yang berbekal pengetahuan dan ketrampilan dipastikan bisa memperoleh gaji dan penghasilan tinggi pula menurut keahlian yang dimiliki. *Kedua*, pilihan pekerjaan yang luas. *Ketiga*, tabungan (*savings*) *relative* lebih besar. Dengan pekerjaan yang baik serta gaji dan penghasilan besar, sangat logis bila para sarjana mempunyai tabungan

yang besar pula. Keempat, jenis pekerjaan dan tempat bekerja yang baik. Kelima, mobilitas individual. Para lulusan perguruan tinggi relative mampu bertukar jenis pekerjaan. Dengan bekal keahlian yang memadai dan kompetensi yang mumpuni, para sarjana lebih mudah memperoleh pekerjaan baru atau berpindah profesi bahkan untuk bidang keahlian yang berlainan sekalipun.

Itulah parameter kualitatif yang lazim digunakan untuk mengukur keuntungan ekonomi pendidikan tinggi. Parameter kualitatif itu bisa dikonversi secara kuantitatif dengan menggunakan metode '*cost-benefit analysis*'. Metode analisis ini melihat perbedaan antara '*private and social rates of return*' lulusan perguruan tinggi, sehingga bisa diketahui berapa besar tingkat kemanfaatan ekonomi pendidikan tinggi baik bagi individu maupun masyarakat. Dimasukkannya dana publik (*social cost*) ke dalam pembiayaan pendidikan menjadikan keuntungan sosial (*social benefit*) layak dipertimbangkan sebagai tolak ukur efektifitas investasi modal manusia, demikian kata Teguh Yudo Wicaksono seorang peneliti pada Departemen Ekonomi CSIS (Kompas, 2004). Dengan kata lain, subsidi pendidikan kepada mahasiswa semestinya bernilai secara efektif untuk masyarakat. Selain manfaat sosial, pendidikan juga memberi manfaat individu (*private benefit*) melalui pendapatan atau akses kepada pekerjaan yang layak. Dalam ekonomi pendidikan, kedua manfaat itu selau dijadikan tolak ukur tentang pengaruh pendidikan terhadap nilai ekonomis, termasuk pembangunan ekonomi.

Metode analisis ini bisa dijadikan dasar pemerintah untuk berinvestasi di level pendidikan tinggi. Studi mutakhir yang dilakukan oleh dua ahli ekonomi konsultan Bank Dunia, Psacharopoulos dan Patrinos, *Returns to Investment in Education* (2002), membuat perbandingan lima kawasan. Hasil studi ini dengan jelas menunjukan perbedaan yang sangat signifikan antara *private rate of return* dan *social rate of return* di seluruh kawasan. Perbandingan masing-masing kawasan adalah: i) Asia: 18,2 persen, ii) Eropa/Timur Tengah/Afrika Utara: 18,8 persen dan 9,9 persen, iii) Amerika Latin /Karibia: 19,5 persen dan 12,3 persen, iv) Negara-negara OECD: 11,6 persen dan 8,5 persen, dan v) Sub-Sahara Afrika: 27,8 persen dan 10,3 persen. Adapun rata-rata tingkat pengembalian untuk pendidikan di Asia dan Indonesia pada khususnya adalah sebagai berikut: (i) India: 13,2 persen dan 10,8 persen, (ii) Indonesia: - 0 persen dan 10 persen (iii) Malaysia: 12,2 persen dan 7,6 persen, (iv) Philipina: 14,0 persen dan 13,3 persen, (v) Papua Nugini: 8,1 persen dan 2,8 persen.

Berdasarkan studi terbaru terlihat, nilai manfaat social pendidikan tinggi cenderung meningkat, meski dengan pertumbuhan relatif lambat. Secara teoritis ada dua hal yang dapat diinterpretasikan dari peningkatan nilai manfaat ini. Pertama, peningkatan nilai manfaat disebabkan penawaran pendidikan tinggi (*Supply of higher education*) masih belum titik jenuh, sehingga setiap unit peningkatan penawaran

masih masih memberi return yang positif (belum mencapai *excess supply*). Kedua, terjadinya perubahan struktur ekonomi dan tenaga kerja dimana permintaan akan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi kian besar yang mendorong lulusan kelompok ini menerima tingkat upah yang tinggi tentu akan memperbesar sumbangan pada Negara melalui pajak dan ini mendorong meningkatnya manfaat social (Kompas, 2004).

Meski nilai manfaat social dari investasi pendidikan tinggi cenderung tumbuh, meminta porsi lebih besar lagi dana public tampaknya perlu dinilai lebih hati-hati. Isu sentral disini terkait keterbatasan pembiayaan public ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan tinggi yang umumnya cukup besar. Temuan empiris Dulfo (2001) menunjukkan, kebijakan pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Meski begitu, temuan ini tidak lantas menyimpulkan, peningkatan mutu pendidikan tinggi tidak penting sama sekali. Meski demikian, pemerintah harus mencari alternative kebijakan lain selain pembiayaan langsung, seperti subsidi maupun bantuan keuangan lain, yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas. Selain itu, tuntutan kualitas tentu akan lebih banyak dialamatkan kepada institusi pendidikan tinggi itu sendiri.

Lantas apa yang bisa dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan kendala minimnya subsidi dana pemerintah? Tentu masih banyak peluang. Dilihat dari indicator manfaat yang cukup tinggi, baik sosial maupun individual, terlihat institusi pendidikan tinggi dalam waktu ke depan masih merupakan "industri" pendidikan dengan tingkat permintaan cukup tinggi, baik oleh penulis masyarakat maupun pasar tenaga kerja. Itulah sebabnya, menurut penulis institusi pendidikan tinggi perlu terintegrasi dengan kalangan usaha dan industri.

Integrasi ini dapat dimaksudkan untuk mendapat pembiayaan operasional maupun meningkatkan mutu pendidikan tinggi sendiri, seperti melalui riset maupun kerja sama perguruan tinggi dengan kalangan usaha. Integrasi ini juga akan mendorong perguruan tinggi untuk memiliki daya kompetensi dan meningkatkan mutu serta kualitasnya. Menurut Peter Jarvis, bentuk perguruan tinggi maupun universitas yang mengambil bentuk seperti yang dimaksud diatas biasanya disebut dengan "*Cooperative Universities*" atau korporasi universitas (Jarvis, 2001:112). Artinya, ialah sebuah Universitas yang diselenggarakan oleh korporasi. Universitas seperti ini masih menyelenggarakan prinsip-prinsip universitas, akan tetapi dimasukkannya aspek-aspek akademis berkaitan dengan kepentingan perusahaan korporasinya. Bentuk universitas seperti ini yang dimaksud semakin banyak bermunculan dari tahun ke tahun yang secara umum menjual keahlian pendidikan mereka ke dunia industri dan komersial, seperti misalnya "*Jones International*

University'. Namun penggunaan istilah ini banyak mendapat reaksi dari universitas-universitas tradisional.

Mengingat universitas korporasi didirikan untuk mendapatkan tempat di pasar pendidikan. Maka, aspek *conomic benefit* dalam hal ini adalah sangat dominant. Perkembangan ini tidak seharusnya mengejutkan universitas-universitas tradisional, karena ini hanya merupakan indikasi lain dari keberhasilan perusahaan kapitalis. Casner Lotto menyebutkan empat inti dari universitas korporasi: (i) membangun kurikulum pelatihan berdasarkan kompetensi untuk setiap jenis pekerjaan (ii) memberikan suatu visi umum perusahaan bagi para pekerja (iii) memperluas pelatihan bagi seluruh jaringan pelanggan, dan (iv) bertindak sebagai laboratorium pembelajaran bagi eksperimen dengan pendekatan-pendekatan dan praktek baru (Casner, 1988:88). Pada universitas korporasi, teori abstrak pengajaran disingkirkan dan pengetahuan praktis menjadi inti dari kurikulum. Program-program dirancang sesuai fungsinya dalam perusahaan, terkonsentrasi pada aspek-aspek pendidikan yang dulunya diperuntukkan untuk pendidikan lebih lanjut. Setiap modul dirancang khusus bagi suatu pekerjaan atau prosedur tertentu dengan dasar praktek lapangan.

Menurut istilah Meister diringkas menjadi "3 C" yakni : (i) *corporate citizenship* (kewarganegaraan korporasi) untuk mengetahui bagaimana cara bekerja perusahaan, nilai-nilai yang dianut serta visi perusahaan (ii) *contextual framework* (kerangka kerja kontekstual) untuk mengenal para pelanggan perusahaan, pesaingnya dan prestasi mereka (iii) *competencies* (kompetensi) untuk mengetahui dan menerapkan kompetensi sendiri atau asli pada pekerjaan baru (Lotto, *et.al.*, 1988:88). Jika demikian halnya, maka usaha meletakkan pendidikan tinggi sebagai sebuah 'industri' akan semakin prospektif dan diminati oleh kalangan praktisi pendidikan tinggi, karena sejalan dengan prinsip 'link' and 'match'.

Data di atas secara terang benderang menggambarkan betapa nilai kemanfaatan ekonomi pendidikan tinggi yang di peroleh orang perorang (individu) itu lebih besar dibandingkan masyarakat luas (*public*). Bila pemerintah berinvestasi di jenjang pendidikan tinggi, maka yang akan memperoleh manfaat ekonomi hanya kelompok masyarakat tertentu saja. Temuan studi ini bisa ditafsirkan, bila dana publik dalam jumlah besar di gunakan untuk membiyai pendidikan tinggi, maka yang paling beruntung justru lapisan masyarakat kelas menengah keatas. Bagi penganut madzhab Marxian, ini jelas akan melenggangkan struktur kemampuan sosial dan menghambat mobilitas vertikal masyarakat kelas bawah. Dalam perspektip demikian, sejatinya arah kebijakan BHMN bisa dikatakan '*on the right track*'. Bagi orang kaya harus membayar lebih mahal untuk bisa kuliah di universitas terbaik itu .namun, pemerintah dan universitas harus membuat kebijakan *affirmative action* guna

melindungi dan memberi kesempatan bagi orang miskin yang berprestasi untuk bisa kuliah diperguruan tinggi.

Penutup

Kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi oleh pemerinth dilakukan melalui konsep BHMN melalui “subsidi silang”, dimana mahasiswa yang mampu dimungkinkan untuk membayar uang perkuliahan sesuai dengan standard maximal yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi, sedangkan untuk mahasiswa yang kurang mampu tetapi potensial hendaknya diberikan beasiswa, sehingga dengan demikian azas pemerataan dan keadilan dapat tercapai. Dan kebijakan pembiayaan pendidikan tingi juga dapat dilakukan melalui “*Cooperative Universities*” atau korporasiuniversitas. Artinya ialah sebuah Universitas yang diselenggarakan oleh korporasi.

Manfaat yang dirasakan dari pembiayaan pendidikan tinggi orang perorang yaitu: Pertama, peningkatan gaji dan penghasilan.. Kedua, pilihan pekerjaan yang luas. Ketiga, tabungan (savings) relative lebih besar. Keempat, jenis pekerjaan dan tempat bekerja yang baik. Kelima, mobilitas individual. Manfaat ekonomi pembiayaan pendidikan tinggi meliputi: Pertama peningkatan pendapatan pajak. Kedua, peningkatan produktiftas. Ketiga, peningkatan konsumsi. Keempat, peningkatan adaptabilitas tenaga kerja. Kelima, penurunan ketergantungan pada bantuan financial pemerintah. Manfaat lain pembiayaan pendidikan tinggi adalah peningkatkan kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi itu sendiri.

Pemecahan permasalahan pembiayaan pendidikan dapat dilakukan melalui Pendekatan “win-win solution”. Artinya, keseimbangan antara *private benefit*. Dengan *public benefit* sehingga kesenjangan antara kelompok yang mampu dengan kelompok yang kurang mampu dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Maka, secara prinsip penulis sangat setuju dengan pendapat yang termaktub dalam makalah ini, yakni bahwa sudah semestinya arah kebijakan BHMN dikaji lagi lebih komprehensif agar tidak menimbulkan kesenjangan dikemudian hari yang justru akan berdampak negative terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Casner-Lotto, J ans Associates. 1988. *Successful Training Strategies*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Dahlin Brian G. 2003. *The Impact of Education on Economic Growth: Theory, Findings, and Policy Implication*. Duke University.

H.A.R. Tilaar. 1995. *Manajemen Pendidikan Tinggi di Indonesia : 50 Tahun Pembangunann Pendidikan nasional 1945-1995 Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Meister J. 1998. *Corporate Universiities*. New York: McGraw Hill.

Paul L. Dress. 1980. *The Autonomy of Public Colleges*. San Francisco: Jossey-Bass Inc Publishers.

Peter Jarvis. 2001. *Universities and Corporate Universities*. USA: Stylus Publishing Inc.